

## BAB III

**ARUS LAPORAN KEUANGAN DANA DEVIDEN BPRS BHAKTI SUMEKAR  
DAN DISTRIBUSI DANA DEVIDEN PADA DINAS PENDAPATAN  
PENGELELOAAN KEUANGAN DAN ASET**

A. BPRS Bhakti Sumekar

BPRS Bhakti Sumekar (dahulu bernama BPR Bhakti Sumekar) adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep. Bank ini didirikan pada tanggal 16 September 2002 dengan bentuk perseroan terbatas (PT), kemudian dalam perkembangannya berubah status menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BPRS Bhakti Sumekar berkantor pusat di Sumenep dengan satu cabang di Pamekasan dan Layanan kantor kas yang tersebar di seluruh Kabupaten Sumenep<sup>54</sup>.

## 1. Latar Belakang dan Sejarah Pendirian

Di keluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya.

<sup>54</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/BPRSbhaktisumekar>

Serta untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut. Dimana pada gilirannya Lembaga Keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara merata.

Bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah Sumenep yang sangat ideal adalah Lembaga Keuangan Mikro, dalam hal ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS).

Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisisi bank Perkreditan Rakyat yang berdomisili di Sidoarjo yaitu PT.BPR DANA MERAPI untuk kemudian direlokasi ke Kabupaten Sumenep.

Untuk melakukan akuisisi terhadap PT. BPR Dana Merapi Pemkab Sumenep membuat Memorandum of Understanding (MOU) dan Surat Perjanjian Kerja Sama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan PT Bank Syari'ah Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember 2001. Dalam MOU tersebut pihak PT.Bank Muamalat sebagai pelaksanaan dalam

proses pengambilalihan BPR serta bertanggung jawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekruitmen, pelatihan dan pembinaan<sup>55</sup>.

## 2. Visi dan Misi

Visi bank BPRS Bhakti Sumekar adalah terwujudnya masyarakat yang  
makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya

Misi bank BPRS Bhakti Sumekar adalah intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasarkan syariah, membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah, mengupayakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah<sup>56</sup>.

### 3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan dan setoran Dana Deviden BPRS Bhakti Sumekar diserahkan langsung ke kantor Kas Daerah yang sudah diaudit oleh BPK (Badan Pengawas Keuangan) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) seperti wawancara berikut:

*Jika setoran dana deviden BPRS Bhakti Sumekar itu langsung kami serahkan ke KASDA (Kas Daerah) yang mana KASDA itu miliknya PEMKAB, dimana kami membayar setoran dana deviden BPRS Bhakti Sumekar tersebut sebesar jumlah setoran yang telah laporan keuangannya diaudit oleh BPK dan OJK<sup>57</sup>.*

Jumlah setoran dana deviden BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam aplikasinya menyesuaikan dengan target yang diminta oleh PEMDA dalam

<sup>55</sup> <https://bhaktisumekar.co.id/2015-05-07-19-03-11/latar-belakang>

<sup>56</sup> <https://bhaktisumekar.co.id/2015-05-07-19-03-11/visi-misi>

<sup>57</sup> Endang, *Wawancara*, Sumenep, 02 Desember 2015

sidang RUPS yang mana target tersebut sebagai acuan dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Sumenep. Seperti kutipan wawancara berikut:

*Target dari PEMDA selalu ada akan tetapi semuanya tergantung besar laba rugi yang diperoleh bank BPRS Bhakti Sumekar dalam satu periode, dan itu tidak sama pertahunnya artinya fluktuatif, kami hanya optimis dan berupaya saja untuk mencapai target tersebut, kadang kami bisa mencapai target itu dan kadang tidak<sup>58</sup>.*

Setoran deviden yang diserahkan ke PEMDA sudah dipotong pajak dan besaran pembagiannya sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan dari laba rugi yang didapatkan oleh bank BPRS Bhakti Sumekar dalam satu periode, seperti hasil wawancara dan kutipan peraturan daerah 20 tahun 2011:

*Hasil laba bersih yang telah dipotong pajak itu yang kami setorkan dari sekian persen yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah<sup>59</sup>. Dalam peraturan daerah nomor: 20 tahun 2011 pasal 70 ayat 2 menyebutkan: *Laba bersih PT. BPRS Bhakti Sumekar setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut : a. Deviden Pemegang Saham 50%. b. Cadangan umum 10%. c. Cadangan tujuan 15%. d. Dana kesejahteraan 10%. e. Jasa produksi 12,5%. f. Dana Sosial 2,5%.**

Keuntungan dana deviden BPRS Bhakti Sumenep sudah ditentukan di  
periode sebelumnya pada sidang RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)  
bersama direktur dan karyawan, artinya direksi BPRS Bhakti Sumekar sudah  
bisa menganalisis berapa kemampuan keuntungan laba bersih yang harus  
diperoleh dari pendapatan operasional BPRS itu sendir pada tahun berikutnya.

<sup>58</sup> *Ibid.* 02 Desember 2015

59 *Ibid*,

Data setoran deviden BPRS Bhakti Sumekar dari tahun ketahun terus meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah penyertaan modal pemerintah daerah dan perolehan laba bersih dari kegiatan operasional bank BPRS Bhakti Sumekar tersebut. Dari tahun 2010 sampai tahun 2015 BPRS Bhakti Sumekar mampu berkotibusi pada daerah sebesar Rp. 29,159,938,175.00, Seperti yang peneliti dapat dari laporan keuangan BRPS Bhakti Sumekar dari tahun 2010 sampai tahun 2015.

Tabel 1.1

Tahun	Saldo Awal Penyertaan Modal	Tambahan Penyertaan Modal	Jumlah Penyertaan Modal	Nilai saham Milik Pihak Lain
2010	40,000,000,000.00		40,000,000,000.00	5,000,000.00
2011	40,000,000,000.00	10,000,000,000.00	50,000,000,000.00	5,000,000.00
2012	50,000,000,000.00	10,000,000,000.00	60,000,000,000.00	5,000,000.00
2013	60,000,000,000.00		60,000,000,000.00	5,000,000.00
2014	60,000,000,000.00	23,300,000,000.00	83,300,000,000.00	5,000,000.00
2015	83,300,000,000.00		83,300,000,000.00	5,000,000.00

Jumlah Nilai Saham Seluruhnya	% Kepemilikan Saham Pemkab Sumenep	PAD yang di Setor
40,005,000,000.00	99.99%	4,031,877,608.00
50,005,000,000.00	99.99%	4,156,580,263.00
60,005,000,000.00	99.99%	4,254,278,588.00
60,005,000,000.00	99.99%	4,955,318,826.00
83,305,000,000.00	99.99%	5,938,245,876.00

83,305,000,000.00	99.99%	5,823,637,014.00
-------------------	--------	------------------

Tabel di atas pada tahun 2015 PAD yang disetor BPRS Bhakti Sumekar ke Kas Daerah belum Fix setoran yang diangsur sebab peneliti melakukan penelitian sebelum berahirnya tahun 2015 artinya masih ada sisa angsuran yang belum dilunasi PT. BPRS Bhakti Sumekar terhadap Kas Daerah. Sehingga peneliti kasih tanda hitam agar pembaca tidak salah menafsirkan atas data yang ada.

Pengelolaan dana deviden BPRS Bhakti Sumekar semuanya di serahkan ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset untuk mendistribusikan dana deviden tersebut kepada masyarakat. Seperti hasil wawancara berikut;

*Pengelolaannya kami percayakan penuh kepada PEMKAB, yang jelas kami percaya bahwa apa yang kami berikan akan dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Sumenep, dan kami hanya melaksanakan kewajiban kami, jadi jika kewajiban kami sudah dilunasi maka tidak ada intervensi dan sangkut pautnya dengan kami lagi<sup>60</sup>.*

Setoran dana deviden BPRS Bhakti Sumekar kepada PEMKAB dibayar secara mengangsur, sebab pihak direksi juga memperhatikan likuiditas yang ada di kas yang terus berputar disalurkan ke masyarakat, seperti wawancara berikut;

*Setelah laporan keuangan diaudit maka kami membayar dana deviden tersebut secara berangsur dan tidak langsung membayar semuanya karena*

60 *Ibid.*

*kami juga harus memperhatikan likuiditas dana yang ada di kas sebab dana kita juga berputar semua, tidak menumpuk disini*<sup>61</sup>.

#### B. Profil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)

Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset ini merupakan sebuah lembaga kepemerintahan daerah kabupaten sumenep.

## 1. Visi, Misi dan Motto

Visi DPPKA yaitu terwujudnya peningkatan pengelolaan pendapatan, asli daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang daerah, yang efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka pelayanan kepada masyarakat menuju otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Misi DPPKA yaitu menggali dan mengembangkan potensi dan sumber penerimaan pajak serta meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien. Di samping itu, untuk memotivasi pelaksana dilakukan pembinaan, pemahaman dalam pelaksanaan di lingkungan DPPKA kabupaten sumenep sehingga terdapat keterpaduan, ketataan dan kerjasama antara karyawan-karyawati sesuai tujuan organisasi yang dituangkan dalam misi sebagai rencana kerja yang akan dilakukan guna mendorong pelaksana dalam memberikan pelayanan terbaik demi kemajuan pemerintahan di kabupaten sumenep sehingga pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan keuangan

<sup>61</sup> *ibid.*

daerah dan pengelolaan asset dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.

## 2. Tugas pokok dan fungsi

Tugas pokok dinas pendapatan, pengelolaan kuangan dan aset daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana dijelaskan dalam pasal 282 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 tahun 2008 adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang pendapatan, pengelolaan keangan dan aset.

Berikutnya fungsi dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep dijelaskan dalam 282 yaitu:

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
  - b. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
  - c. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang penatausahaan keuanga;
  - d. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang aset;
  - e. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang pembukuan dan verifikasi;
  - f. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);
  - g. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;

- h. Penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);
  - i. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya<sup>62</sup>.

### 3. Alur dan pendistribusian dana deviden di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Alur penyetoran dana deviden BPRS Bhakti Sumekar dari bank BPRS Bhakti Sumekar langsung diserahkan ke kas daerah kemudian dari kas daerah dikelola oleh dinas pengelolaan keuangan dan aset, seperti kutipan wawancara berikut;

*Jika alur dana deviden itu langsung masuk ke Kas Daerah, tidak langsung masuk ke kami, kecuali pendapatan pajak dan pendapatan lain-lain, tapi khusus untuk dana deviden tersebut langsung masuk ke rekening Kas Daerah<sup>63</sup>.*

Faktor yang mempengaruhi besarnya dana deviden tiap tahunnya itu tergantung laba rugi sekaligus berdasarkan sidang RUPS di tahun sebelumnya, disini pemerintah hanya menentukan target untuk plafond awal yang mengacu pada hasil deviden di tahun sebelumnya. Artinya besarnya deviden tergantung hasil laba bersih yang di dapat bank BPRS tersebut, meskipun ada target besarnya dana deviden yang pemerintah daerah

<sup>62</sup> <http://www.dppka-sumenep.net/?aksi=konten&id=66>

<sup>63</sup> Imam Hidayat, *Wawancara*, Sumenep 30 Desember 2015

tanggung jawabkan pada bank BPRS Bhakti Sumekar. Seperti ungkapan wawancara berikut:

*Besarnya dana deviden itu kan berdasarkan hasil RUPSnya mereka, kita ada PERDAnya berapa presentase yang masuk KASDA, berdasar hasil laba rugi mereka, dari pemerintah daerah hanya menggunakan flafond yang mengacu pada deviden tahun lalu<sup>64</sup>.*

Pembayaran dana deviden tidak langsung dilunasi seketika akan tetapi pembayarannya diangsur hingga memenuhi target dari deviden yang BPRS harus dibayarkan pada tahun tersebut, jika BPRS tidak memenuhinya atau membayar lunas pada tahun itu maka akan diakui hutang oleh pemerintah daerah. Seperti dilansir dari wawancara berikut:

Untuk pembayaran deviden itu tidak boleh ditahan sampai tahun berikutnya harus dilunasi tahun itu juga, karena jika sampai dilunasi tahun berikutnya dineraca kami akui hutang nanti. jadi deviden itu wajib disetor di tahun itu masalah mau membayar berapa kali dalam satu tahun itu terserah mereka (Pihak BPRS) tidak ada aturan khusus untuk kebijakan pembayaran dana deviden itu<sup>65</sup>.

Pengelolaan dana deviden tersebut, dicampur dengan pendapatan daerah lainnya, tidak ada spesifikasi khusus terkait pengelolaan dana deviden itu sendiri. Semua program mengikuti program kerja pemerintah daerah yang kesemuanya itu hanya semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat sumenep. Seperti hasil wawancara berikut:

*Jadi dalam satu tahun anggaran, kita memperoleh laporan kegiatan dan kita punya silva disini, misal dari pendapatan kita tahun kemaren punya pendapatan sekian, dan kita kita punya silva sekian, dan silva ini untuk tahun berikutnya kita gunakan untuk anggaran dan program kegiatan di SKPD jadi kami tidak tau artinya kami tidak bisa memfokuskan atau memisahkan dana*

<sup>64</sup> *Ibid*, Sumenep 30 Desember 2015

<sup>65</sup> *Ibid*, Sumenep 30 Desember 2015

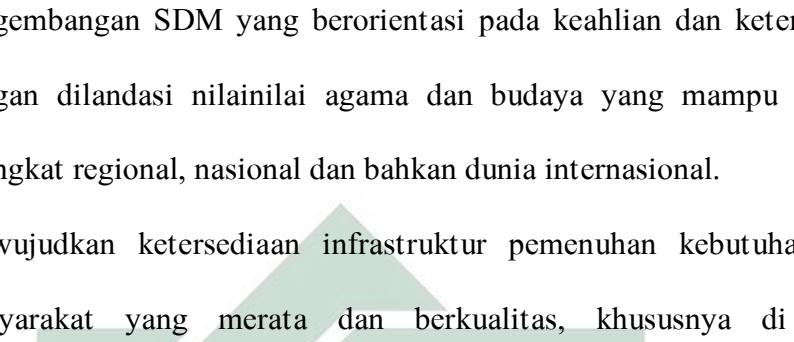
*deviden itu untuk satu kegiatan sebab ini sudah menjadi satu kesatuan di silva ini*<sup>66</sup>.

#### 4. Anggaran dan realisasi anggaran daerah Kabupaten Sumenep.

Program pemerintah Kabupaten Sumenep secara umum terdiri dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomer:...Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep tahun 2011-2015, Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang makin maju dan mandiri, Peningkatan kualitas pelaku usaha serta pengembangan industri kecil dan menengah yang mempertimbangkan kebutuhan lokal dan mampu bersaing di tingkat regional dan nasional.
  2. Mengembangkan pola pengelolaan SDA dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan.
  3. Peningkatan pembangunan di wilayah kepulauan agar perkembangannya makin seimbang dengan kondisi wilayah daratan

<sup>66</sup> *Ibid*, Sumenep 30 Desember 2015

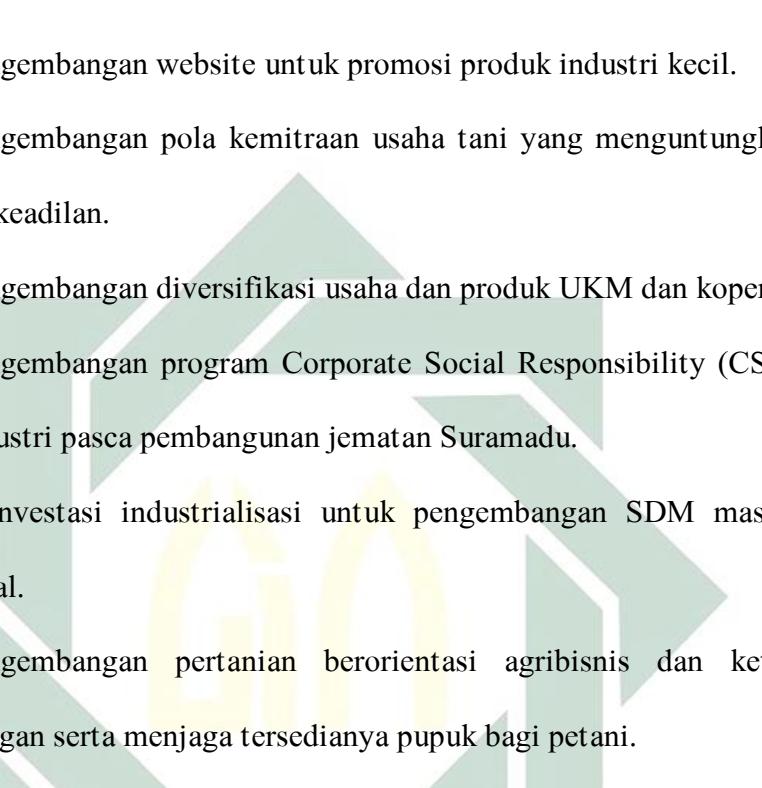
- 
  4. Menyempurnakan dan mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan keterampilan dengan dilandasi nilainilai agama dan budaya yang mampu bersaing ditingkat regional, nasional dan bahkan dunia internasional.
  5. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang merata dan berkualitas, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan serta permukiman.
  6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan konsistensi dalam penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan dan berwibawa<sup>67</sup>.

Uraian dari 6 (enam) pokok yang dikemukakan di atas, secara lebih rinci arah pembangunan difokuskan pada program prioritas sebagai berikut.

a. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang makin maju dan mandiri, peningkatan kualitas pelaku usaha serta pengembangan industri kecil menengah yang mempertimbangkan kebutuhan lokal dan mampu bersaing di tingkat regional dan nasional, dengan fokus program prioritasnya adalah:

- 1) Pemberdayaan UKM berbasis pemilikan aset produksi
  - 2) Pemberdayaan buruh tani, buruh industri kecil dan, buruh nelayan.

<sup>67</sup> Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor:...Tahun 2011, *tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep tahun 2011-2015*, hal : 113.

- 
  - 3) Peningkatan ekonomi masyarakat miskin dengan pemberian bantuan social
  - 4) Pengembangan website untuk promosi produk industri kecil.
  - 5) Pengembangan pola kemitraan usaha tani yang menguntungkan dan berkeadilan.
  - 6) Pengembangan diversifikasi usaha dan produk UKM dan koperasi
  - 7) Pengembangan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari industri pasca pembangunan jematan Suramadu.
  - 8) Reinvestasi industrialisasi untuk pengembangan SDM masyarakat lokal.
  - 9) Pengembangan pertanian berorientasi agribisnis dan ketahanan pangan serta menjaga tersedianya pupuk bagi petani.
  - 10) Peningkatan infrastruktur ekonomi yang mendukung kegiatan produktif masyarakat.

b. Mengembangkan pola pengelolaan SDA dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan social masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan, dengan fokus program prioritasnya adalah:

- 1) Industrialisasi dan eksplorasi SDA yang melibatkan peran aktif masyarakat lokal.
  - 2) Eksplorasi dan peningkatan daya saing sektor pertanian dan kelautan.

- 3) Pemantapan rencana dan penataan ruang daerah yang efisien serta menjamin kelestarian lingkungan hidup.
- c. Peningkatan pembangunan di wilayah kepulauan agar perkembangannya makin seimbang dengan kondisi wilayah daratan, dengan fokus program prioritasnya adalah:
- 1) Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemukiman di wilayah kepulauan.
- d. Peningkatan infrastruktur dan kelembagaan pelayanan air bersih dan kelistrikan di wilayah kepulauan.
- 1) Peningkatan infrastruktur dan jaringan transportasi darat dan laut di wilayah kepulauan.
  - 2) Peningkatan pengelolaan potensi SDA di wilayah kepulauan serta menjamin kelestarian lingkungan.
- e. Menyempurnakan dan mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan ketrampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya yang mampu bersaing ditingkat regional, nasional bahkan dunia internasional, dengan fokus program prioritasnya adalah:
- 1) Peningkatan dan pemerataan pendidikan sebagai indikator pembangunan manusia.
  - 2) Revitalisasi SMK yang mendukung potensi daerah.

- 3) Pengembangan sekolah kawasan bermutu.
  - 4) Peningkatan kesejahteraan dan status pendidik.
  - 5) Perlindungan, pemenuhan hak-hak anak dan pemberdayaan perempuan.
  - 6) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengembangan keluarga kecil sejahtera.
- f. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang merata dan berkualitas, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan serta pemukiman, dengan fokus program prioritasnya adalah:
- 1) Pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas, Polindes dan Poskesdes berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
  - 2) Peningkatan pelayanan kesehatan dan program Puskesmas Gratis.
  - 3) Peningkatan sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan.
  - 4) Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih, energi dan ketenagalistrikan.
  - 5) Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat.
  - 6) Pemenuhan kebutuhan fasilitas publik sektor ekonomi dan sosial, termasuk fasilitas transportasi darat dan laut.
- g. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan konsistensi penegakan hukum yang menjamin rasa

keadilan dan berwibawa, dengan fokus program prioritasnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberlakuan SPM dalam berbagai layanan publik.
  - 2) Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.
  - 3) Pengembangan saluran komunikasi umaroh, ulama dan masyarakat.
  - 4) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara.
  - 5) Peningkatan potensi sumber keuangan daerah.
  - 6) Peningkatan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran keuangan sektor publik<sup>68</sup>.

**TABEL 1.2**  
**Ringkasan Perbandingan Capaian Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten  
Sumenep tahun 2010 sampai 2014**

Data tahun 2010

URAIAN	2010			
	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	%
PENDAPATAN DAERAH	953,928,315,356	953,403,305,809.92	(525,009,546.08)	99.94
PENDAPATAN ASLI DAERAH	38,797,114,248	46,702,756,751.92	7,905,642,503.92	120.38
Hasil Pajak Daerah	5,930,698,550	7,136,069,604.00	1,205,371,054.00	120.32
Hasil Retribusi Daerah	21,538,816,828.00	22,335,822,100.00	797,005,272.00	103.70

68 *Ibid.*, 116

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,034,557,620.00	5,591,632,728.39	557,075,108.39	111.07
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6,293,041,250.00	11,639,232,319.53	5,346,191,069.53	184.95
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>774,014,628,091.00</b>	<b>787,554,530,823.00</b>	<b>13,539,902,732.00</b>	<b>101.75</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	138,627,572,091.00	158,802,374,823.00	20,174,802,732.00	114.55
Dana Alokasi Umum	54,535,400,000.00	580,851,656,000.00	526,316,256,000.00	1,065.09
Dana Alokasi Khusus	54,535,400,000.00	47,900,500,000.00	(6,634,900,000.00)	87.83
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>141,116,573,017.00</b>	<b>119,146,018,235.00</b>	<b>(21,970,554,782.00)</b>	<b>84.43</b>
Pendapatan Hibah			0.00	0.00
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	27,462,731,217.00	31,919,993,997.00	4,457,262,780.00	116.23
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	73,953,271,800.00	59,691,196,800.00	(14,262,075,000.00)	100.00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	39,340,870,000.00	27,175,577,438.00	(12,165,292,562.00)	69.08
Bantuan Keuangan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Kelompok Masyarakat/ individu	359,700,000.00	359,250,000.00	(450,000.00)	99.87
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,074,913,212,403.00</b>	<b>948,049,327,983.00</b>	<b>(126,863,884,420.00)</b>	<b>88.20</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>782,519,705,133.00</b>	<b>736,733,325,567.00</b>	<b>(45,786,379,566.00)</b>	<b>94.15</b>
Belanja Pegawai	608,007,430,133.00	584,504,907,199.00	(23,502,522,934.00)	96.13
Belanja Bunga		0	0.00	0.00
Belanja Subsidi	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	100.00
Belanja Hibah	111,625,364,500.00	96,224,392,520.00	(15,400,971,980.00)	86.20
Belanja Bantuan Sosial	16,093,650,500.00	13,673,060,528.00	(2,420,589,972.00)	84.96

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	41,771,260,000.00	41,360,626,100.00	(410,633,900.00)	99.02
Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	948,339,220.00	(4,051,660,780.00)	18.97
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>292,393,507,270.00</b>	<b>211,316,002,416.00</b>	<b>(81,077,504,854.00)</b>	<b>72.27</b>
Belanja Pegawai	17,985,742,002.00	15,718,724,988.00	(2,267,017,014.00)	87.40
Belanja Barang Dan Jasa	119,252,456,297.00	102,369,317,733.00	(16,883,138,564.00)	85.84
Belanja Modal	155,155,308,971.00	93,227,959,695.00	(61,927,349,276.00)	60.09
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(120,984,897,047.00)</b>	<b>5,353,977,826.92</b>	<b>126,338,874,873.92</b>	<b>(4.43)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>188,543,970,561.00</b>	<b>175,379,995,126.99</b>	<b>(13,163,975,434.01)</b>	<b>93.02</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	155,543,970,561.00	155,543,970,561.11	0.11	100.00
Pencairan Dana Cadangan	17,500,000,000.00	18,904,571,311.88	1,404,571,311.88	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	931,453,254.00	931,453,254.00	100.00
Penerimaan Dana dari Transfer Deposito	15,500,000,000.00	0	(15,500,000,000.00)	0.00
Penerimaan Piutang Daerah			0.00	0.00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>67,559,073,514.00</b>	<b>9,561,387,214.00</b>	<b>(57,997,686,300.00)</b>	<b>14.15</b>
Pembentukan Dana Cadangan	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	0.00	100.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,300,000,000.00	5,300,000,000.00	0.00	100.00
Pembayaran Pokok Utang	427,905,819.00	261,387,214.00	(166,518,605.00)	61.09

Transfer ke Dana Deposito	57,831,167,695.00	-	(57,831,167,695.00)	0.00
PEMBIAYAAN NETTO	120,984,897,047.00	165,818,607,912.99		
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN				

Data tahun 2012

URAIAN	2011			
	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	%
PENDAPATAN DAERAH	1,138,173,477,018.00	1,147,757,600,881.10	9,584,123,863.10	100.84
PENDAPATAN ASLI DAERAH	52,934,248,645.00	57,940,353,705.10	5,006,105,060.10	109.46
Hasil Pajak Daerah	6,755,055,500.00	7,365,871,595.00	610,816,095.00	109.04
Hasil Retribusi Daerah	25,968,170,000	26,987,770,440.55	1,019,600,440.55	103.93
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9,482,264,473.00	8,527,278,311.46	(954,986,161.54)	89.93
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10,728,758,672.00	15,059,433,358.09	4,330,674,686.09	140.37
DANA PERIMBANGAN	890,929,575,235.00	895,862,161,748.00	4,932,586,513.00	100.55

<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	158,758,312,235.00	163,709,398,748.00	4,951,086,513.00	103.12
Dana Alokasi Umum	664,406,763,000.00	664,406,763,000.00	0.00	100.00
Dana Alokasi Khusus	67,764,500,000.00	67,746,000,000.00	(18,500,000.00)	99.97
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>194,309,653,138.00</b>	<b>193,955,085,428.00</b>	<b>(354,567,710.00)</b>	<b>99.82</b>
Pendapatan Hibah	-	-	0.00	0.00
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	32,894,245,106.00	35,188,026,214.00	2,293,781,108.00	106.97
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	125,435,070,400.00	125,461,860,400.00	26,790,000.00	100.00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	35,868,535,000.00	33,249,209,814.00	(2,619,325,186.00)	92.70
Bantuan Keuangan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Kelompok Masyarakat/ individu	111,802,632.00	55,989,000.00	(55,813,632.00)	50.08
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,231,525,862,521.00</b>	<b>1,108,144,268,084.49</b>	<b>(123,381,594,436.51)</b>	<b>89.98</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>842,086,786,667.00</b>	<b>800,881,865,404.66</b>	<b>(41,204,921,262.34)</b>	<b>95.11</b>
Belanja Pegawai	682,999,916,606.00	654,406,259,395.00	(28,593,657,211.00)	95.81
Belanja Bunga	-	-	0.00	0.00
Belanja Subsidi	22,000,000.00	-	(22,000,000.00)	0.00
Belanja Hibah	80,726,851,000.00	77,856,629,000.00	(2,870,222,000.00)	96.44
Belanja Bantuan Sosial	24,799,719,061.00	20,232,326,592.6	(4,567,392,468.34)	81.58

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	48,538,300,000.00	47,518,373,500.00	6 (1,019,926,500.00 )	97.90
Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	868,276,917.00	17.37 (4,131,723,083.00 )	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>389,439,075,854.00</b>	<b>307,262,402,679.83</b>	<b>78.90 (82,176,673,174.17)</b>	
Belanja Pegawai	25,802,686,985.00	24,040,893,452.00	93.17 (1,761,793,533.00 )	
Belanja Barang Dan Jasa	166,757,515,159.00	151,042,259,423.36	90.58 (15,715,255,735.64)	
Belanja Modal	196,878,873,710.00	132,179,249,804.47	67.14 (64,699,623,905.53)	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(93,352,385,503.00 )</b>	<b>39,613,332,796.61</b>	<b>132,965,718,299.61 (42.43)</b>	
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>171,172,585,740.00</b>	<b>172,018,018,682.91</b>	<b>845,432,942.91 100.49</b>	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	171,172,585,740.00	171,172,585,739.91	(0.09) 100.00	
Pencairan Dana Cadangan	-	-	0.00 0.00	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	845,432,943.00	845,432,943.00 100.00	
Penerimaan Dana dari Transfer Deposito	-	-	0.00 0.00	
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	0.00 0.00	
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>77,820,200,237.00</b>	<b>29,000,000,000.00</b>	<b>(48,820,200,237.00) 37.27</b>	

Pembentukan Dana Cadangan	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	0.00	100.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	0.00	100.00
Pembayaran Pokok Utang	-	-	0.00	0.00
Transfer ke Dana Deposito	48,820,200,237.00	-	(48,820,200,237.00)	0.00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>93,352,385,503.00</b>	<b>143,018,018,682.91</b>		
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>				

Data Tahun 2012

URAIAN	2012			
	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	%
PENDAPATAN DAERAH	1,322,918,986,510.00	1,338,898,292,216.04	15,979,305,706.04	101.21
PENDAPATAN ASLI DAERAH	73,543,192,483.00	85,886,851,769.04	12,343,659,286.04	116.78
Hasil Pajak Daerah	7,696,564,500.00	9,064,183,146.00	1,367,618,646.00	117.77
Hasil Retribusi Daerah	11,359,489,000.00	18,832,587,899.00	7,473,098,899.00	165.79

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16,691,000,000.00	0 3	11,999,875,610.6 3	(4,691,124,389.37 )	71.89
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	37,796,138,983.00	45,990,205,113.4 1	8,194,066,130.41		121.68
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,051,672,826,675. 00</b>	<b>1,057,063,649,15 4.00</b>	<b>5,390,822,479.00</b>	<b>100.51</b>	
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	175,771,808,675.0 0	181,162,631,154. 00	5,390,822,479.00		103.07
Dana Alokasi Umum	807,976,168,000.0 0	807,976,168,000. 00	0.00		100.00
Dana Alokasi Khusus	67,924,850,000.00	67,924,850,000.0 0	0.00		100.00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>197,702,967,352.0 0</b>	<b>195,947,791,293. 00</b>	<b>(1,755,176,059.00 )</b>	<b>99.11</b>	
Pendapatan Hibah	337,530,000.00	127,359,400.00	(210,170,600.00)		37.73
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	36,606,599,352.00	35,202,541,303.0 0	(1,404,058,049.00 )		96.16
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	107,580,003,000.0 0	108,225,273,000. 00	645,270,000.00		100.60
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	53,008,835,000.00	52,318,085,000.0 0	(690,750,000.00)		98.70
Bantuan Keuangan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Kelompok Masyarakat/ individu	170,000,000.00	74,532,590.00	(95,467,410.00)		43.84
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,422,283,673,196. 00</b>	<b>1,276,780,256,59 4.39</b>	<b>(145,503,416,601. 61)</b>	<b>89.77</b>	
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>910,187,537,631.0 0</b>	<b>855,506,178,970. 20</b>	<b>(54,681,358,660.8 0)</b>	<b>93.99</b>	

Belanja Pegawai	754,187,783,256.00	732,457,756,235.20	(21,730,027,020.80)	97.12	
Belanja Bunga	-	-	0.00	0.00	
Belanja Subsidi	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00	
Belanja Hibah	82,223,425,500.00	59,816,550,500.00	(22,406,875,000.00)	72.75	
Belanja Bantuan Sosial	13,314,243,875.00	7,661,093,875.00	(5,653,150,000.00)	57.54	
Belanja Bantuan Kewangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	55,669,800,000.00	54,874,782,360.00	(795,017,640.00)	98.57	
Belanja Tidak Terduga	4,767,285,000.00	695,996,000.00	(4,071,289,000.00)	14.60	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>512,096,135,565.00</b>	<b>421,274,077,624.19</b>	<b>(90,822,057,940.81)</b>	<b>82.26</b>	
Belanja Pegawai	29,776,803,586.00	27,390,601,971.00	(2,386,201,615.00)	91.99	
Belanja Barang Dan Jasa	233,568,820,218.00	199,522,287,650.42	(34,046,532,567.58)	85.42	
Belanja Modal	248,750,511,761.00	194,361,188,002.77	(54,389,323,758.23)	78.13	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(99,364,686,686.00)</b>	<b>62,118,035,621.65</b>	<b>161,482,722,307.65</b>	<b>(62.52)</b>	
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>182,631,351,479.00</b>	<b>183,031,194,825.52</b>	<b>399,843,346.52</b>	<b>100.22</b>	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	182,631,351,479.00	182,631,351,479.52	0.52	100.00	
Pencairan Dana Cadangan	-	-	0.00	0.00	

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	399,843,346.00	399,843,346.00	100.00
Penerimaan Dana dari Transfer Deposito	-	-	0.00	0.00
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	0.00	0.00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>83,266,664,793.00</b>	<b>24,500,000,000.00</b>	<b>(58,766,664,793.00)</b>	<b>29.42</b>
Pembentukan Dana Cadangan	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	0.00	100.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20,500,000,000.00	20,500,000,000.00	0.00	100.00
Pembayaran Pokok Utang	-	-	0.00	0.00
Transfer ke Dana Deposito	58,766,664,793.00	-	(58,766,664,793.00)	0.00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>99,364,686,686.00</b>	<b>158,531,194,825.52</b>		
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>-</b>			

Data Tahun 2013

URAIAN	2013			
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	%
PENDAPATAN DAERAH	1,476,988,036,656. 00	1,496,942,367,71 0.06	19,954,331,054.0 6	101.35

<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>95,661,749,829.00</b>	<b>97,052,073,113.06</b>	<b>1,390,323,284.06</b>	<b>101.45</b>
Hasil Pajak Daerah	11,789,033,850.00	10,564,664,181.00	(1,224,369,669.00)	89.61
Hasil Retribusi Daerah	20,915,865,979.00	23,233,517,732.00	2,317,651,753.00	111.08
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11,848,300,000.00	10,975,656,673.94	(872,643,326.06)	92.63
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	51,108,550,000.00	52,278,234,526.12	1,169,684,526.12	102.29
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,155,014,551,007.00</b>	<b>1,172,824,731,883.00</b>	<b>17,810,180,876.00</b>	<b>101.54</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	158,255,762,007.00	176,065,942,883.00	17,810,180,876.00	111.25
Dana Alokasi Umum	917,539,019,000.00	917,539,019,000.00	0.00	100.00
Dana Alokasi Khusus	79,219,770,000.00	79,219,770,000.00	0.00	100.00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>226,311,735,820.00</b>	<b>227,065,562,714.00</b>	<b>753,826,894.00</b>	<b>100.33</b>
Pendapatan Hibah	622,597,000.00	1,669,092,300.00	1,046,495,300.00	268.09
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	38,563,566,748.00	41,690,739,414.00	3,127,172,666.00	108.11
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	162,236,237,072.00	158,956,296,000.00	(3,279,941,072.00)	97.98
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	24,719,335,000.00	24,719,335,000.00	0.00	100.00

Bantuan Keuangan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Kelompok Masyarakat/ individu	170,000,000.00	30,100,000.00	(139,900,000.00)	17.71
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,625,305,835,296.00</b>	<b>1,421,813,461,874.70</b>	<b>(203,492,373,421.30)</b>	<b>87.48</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,022,481,022,490.00</b>	<b>945,189,277,157.00</b>	<b>(77,291,745,333.00)</b>	<b>92.44</b>
Belanja Pegawai	852,038,889,084.00	781,443,146,182.00	(70,595,742,902.00)	91.71
Belanja Bunga	-	-	0.00	0.00
Belanja Subsidi	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00
Belanja Hibah	97,210,007,500.00	95,522,755,500.00	(1,687,252,000.00)	98.26
Belanja Bantuan Sosial	6,831,990,000.00	5,227,312,000.00	(1,604,678,000.00)	76.51
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	62,662,300,000.00	61,718,842,475.00	(943,457,525.00)	98.49
Belanja Tidak Terduga	3,712,835,906.00	1,277,221,000.00	(2,435,614,906.00)	34.40
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>602,824,812,806.00</b>	<b>476,624,184,717.70</b>	<b>(126,200,628,088.30)</b>	<b>79.07</b>
Belanja Pegawai	33,246,842,695.00	29,964,859,974.00	(3,281,982,721.00)	90.13
Belanja Barang Dan Jasa	271,532,038,119.00	225,285,004,303.06	(46,247,033,815.94)	82.97
Belanja Modal	298,045,931,992.00	221,374,320,440.64	(76,671,611,551.36)	74.28
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(148,317,798,640.00</b>	<b>75,128,905,835.36</b>	<b>223,446,704,475.36</b>	<b>(50.65)</b>

	0)	6			
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	220,649,230,447.00	220,912,223,787.17	262,993,340.17	100.12	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	220,649,230,447.00	220,649,230,447.17	0.17	100.00	
Pencairan Dana Cadangan	-	-	0.00	0.00	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	262,993,340.00	262,993,340.00	100.00	
Penerimaan Dana dari Transfer Deposito	-	-	0.00	0.00	
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	0.00	0.00	
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	0.00	100.00	
Pembentukan Dana Cadangan	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	0.00	100.00	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	0.00	100.00	
Pembayaran Pokok Utang	-	-	0.00	0.00	
Transfer ke Dana Deposito	-	-	0.00	0.00	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	215,049,230,447.00	215,312,223,787.17			
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>					

**Data Tahun 2014**

URAIAN	2014			
	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,606,203,648,654.00</b>	<b>1,647,362,227,719.17</b>	<b>41,158,579,065.17</b>	<b>102.56</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>143,671,121,947.00</b>	<b>162,371,865,154.17</b>	<b>18,700,743,207.17</b>	<b>113.02</b>
Hasil Pajak Daerah	17,616,525,497.00	14,513,053,554.55	(3,103,471,942.45)	82.38
Hasil Retribusi Daerah	17,079,119,550.00	15,794,071,399.00	(1,285,048,151.00)	92.48
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14,264,500,000.00	11,907,362,458.91	(2,357,137,541.09)	83.48
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	94,710,976,900.00	120,157,377,741.71	25,446,400,841.71	126.87
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,193,856,290,082.00</b>	<b>1,219,793,909,333.00</b>	<b>25,937,619,251.00</b>	<b>102.17</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	145,446,645,082.00	171,384,264,333.00	25,937,619,251.00	117.83
Dana Alokasi Umum	984,839,445,000.00	984,839,445,000.00	0.00	100.00
Dana Alokasi Khusus	63,570,200,000.00	63,570,200,000.00	0.00	100.00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>268,676,236,625.00</b>	<b>265,196,453,232.00</b>	<b>(3,479,783,393.00)</b>	<b>98.70</b>
Pendapatan Hibah	859,840,000.00	1,098,027,925.00	238,187,925.00	127.70
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	45,963,272,625.00	44,641,376,307.00	(1,321,896,318.00)	97.12
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	175,635,664,000.00	173,152,039,000.00	(2,483,625,000.00)	98.59

Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	46,047,460,000.00	46,305,010,000.00	257,550,000.00	100.56
Bantuan Keuangan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Kelompok Masyarakat/ individu	170,000,000.00	0.00	(170,000,000.00)	0.00
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,584,787,365,346.00</b>	<b>1,607,328,844,636.22</b>	<b>22,541,479,290.22</b>	<b>101.42</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>895,110,589,919.00</b>	<b>1,021,300,512,004.20</b>	<b>126,189,922,085.20</b>	<b>114.10</b>
Belanja Pegawai	895,110,589,919.00	848,364,146,944.20	(46,746,442,974.80)	94.78
Belanja Bunga	0.00	-	0.00	0.00
Belanja Subsidi	0.00	-	0.00	0.00
Belanja Hibah	93,643,250,000.00	83,214,089,100.00	(10,429,160,900.00)	88.86
Belanja Bantuan Sosial	4,688,400,000.00	3,820,550,000.00	(867,850,000.00)	81.49
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	85,108,612,844.00	83,979,354,960.00	(1,129,257,884.00)	98.67
Belanja Tidak Terduga	4,000,000,000.00	1,922,371,000.00	(2,077,629,000.00)	48.06
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>689,676,775,427.00</b>	<b>586,028,332,632.02</b>	<b>(103,648,442,794.98)</b>	<b>84.97</b>
Belanja Pegawai	54,060,611,919.00	48,470,492,942.00	(5,590,118,977.00)	89.66
Belanja Barang Dan Jasa	310,844,134,092.00	259,772,481,458.48	(51,071,652,633.52)	83.57
Belanja Modal	324,772,029,416.00	277,785,358,231.54	(46,986,671,184.46)	85.53
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>21,416,283,308.00</b>	<b>40,033,383,082.95</b>	<b>18,617,099,774.95</b>	<b>186.93</b>

<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	182,631,351,479.00	290,885,683,089.53	108,254,331,610.53	159.27	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	290,441,139,725.00	290,441,139,725.53	0.53	100.00	
Pencairan Dana Cadangan	-	-	0.00	0.00	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	444,543,364.00	444,543,364.00	100.00	
Penerimaan Dana dari Transfer Deposito	-	-	0.00	0.00	
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	0.00	0.00	
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	124,417,160,189.00	55,184,340,000.00	(69,232,820,189.00)	44.35	
Pembentukan Dana Cadangan	31,884,340,000.00	31,884,340,000.00	0.00	100.00	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	92,532,820,189.00	23,300,000,000.00	(69,232,820,189.00)	25.18	
Pembayaran Pokok Utang	-	-	0.00	0.00	
Transfer ke Dana Deposito	-	-	0.00	0.00	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	58,214,191,290.00	235,701,343,089.53			
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	-	-			